

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Bantuan Paket Internet Memble

Dewan Akan Tegur Dinas Pendidikan

JAKARTA-Sejumlah orang tua siswa mulai mengeluhkan sistem belajar-mengajar online selama masa pandemi Covid-19. Para orang tua harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk membeli paket internet selama anak-anaknya menjalani proses belajar mengajar di rumah.

Padahal, apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomer 19 tahun 2020, tentang perubahan Juknis BOS Reguler pada masa pandemi Covid-19, orang tua siswa bisa mendapat bantuan dari sekolah untuk pembelian paket internet tersebut.

"Ini sangat memberatkan kita sebagai orang tua siswa, apalagi disaat Corona sekarang ini beban ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sudah cukup berat. Ditambah harus beli kuota internet untuk belajar anak. Harusnya ada bantuan dari sekolah, tapi sampai sekarang belum juga ada," keluh salah seorang orang tua siswa SDN 04 Tanjung Priok Jakarta



Jangan ditunda – tunda lagi salurkan segera. Orang tua siswa sudah berat menanggung kebutuhan ekonomi sehari-hari selama pandemi Corona, jangan ditambah lagi dengan biaya paket kuota internet."

Iman Satria
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta

Utara yang tak ingin disebut namanya.

Ternyata dari informasi yang diperoleh, banyak sekolah di DKI Jakarta belum memberikan bantuan kuota internet kepada siswa didiknya selama pandemi Covid-19 dengan berbagai alasan. Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, mengaku terkejut karena penyaluran bantuan kuota jelas sudah ada aturannya.

Karenanya ia berjanji akan menegur Kepala Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah yang belum menyalurkan kuota internet kepada para

siswa, sekaligus akan melakukan pengecekan langsung ke sekolah – sekolah yang belum menyalurkan bantuan, seperti apa kendalanya.

Anggota dewan dari Partai Gerindra ini juga dengan tegas meminta kepada Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk segera menyalurkan bantuan kuota internet kepada para siswa. "Jangan ditunda – tunda lagi salurkan segera. Orang tua siswa sudah berat menanggung kebutuhan ekonomi sehari-hari selama pandemi Corona, jangan ditambah lagi dengan biaya paket kuota internet," pungkasnya.



SUBBAGIAN HUMAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Berikan Bansos Plus untuk Korban PHK

Harus Sinergi

Bantuan sosial (bansos) antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta berpolemik. Fraksi Nas-Dem DPRD DKI meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama-sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," ujar Wibi, di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Dia tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut baik pusat ataupun daerah. Karena yang menjadi prioritas

adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan. "Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," ucapnya.

Wibi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemmasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat defisit anggaran di APBD DKI akibat Covid-19. "Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov DKI fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak, tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat," ujarnya.

Bahas Lockdown

Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat Mujiyono menanggapi Menko PMK Muhadjir Effendy yang bicara soal permintaan karantina wilayah atau lockdown wilayah yang sempat digaungkan sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta. Usulan lockdown DKI dianggap konyol.

Mujiyon mengatakan, Muhadjir Effendy merupakan satu dari tiga menteri yang mengeroyok Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya pembahasan

lockdown Menteri Muhadjir terbilang terlambat mengingat, PSBB sudah masuk tahap kedua. "Ini salah satu dari tiga serangkai yang keroyok Pak @aniesbaswedan pas Ultah kemaren. Kayaknya emang baru bangun tidur nih, hari gini ngomongin soal Lockdown, PSBB udah masuk tahap ke 2 Cing!," cetus Mujiyono dalam akun Twiternya @RAMujiyono.

Sebelumnya Muhadjir Effendy mengatakan, lockdown memiliki konsekuensi yang tak main-main. Sebab itu artinya pemerintah wajib membiayai semua kebutuhan dasar masyarakat, tanpa terkecuali. Juga dampak ekonomi yang harus ditanggung semua unsur di wilayah itu.

Selain menjamin kebutuhan dasar warganya, pemerintah juga wajib menanggung kebutuhan dasar hewan peliharaan yang dimiliki oleh hampir sembilan warga Jakarta. "Padahal di dalam UU jelas, kalau kita me-lockdown, itu seluruh kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat yang di-lockdown itu harus jadi tanggungan pemerintah pusat. Bukan hanya orangnya, termasuk juga hewan peliharaan," jelasnya. (dni)